



Judul : 59 Kali Pakai Jet Pribadi Komisioner KPU Dipanggil DPR
Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

59 Kali Pakai Jet Pribadi Komisioner KPU Dipanggil DPR

SENAYAN bakal memanggil komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penggunaan jet pribadi di luar rute logistik saat Pemilu 2024 yang menelan biaya sewa Rp 90 miliar.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menegaskan, komisioner KPU akan dimintai keterangan terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Sebab semua penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Terlebih anggaran Pemilu 2024 sangat besar.

"Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa sidang) awal November, kami akan panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut," kata Dede dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025). Pada Selasa (21/10/2025),

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan empat anggota komisioner lainnya atas penggunaan jet pribadi selama Pemilu 2024. Keempatnya adalah Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sanksi serupa juga diberikan kepada Sekretaris Jenderal KPU Bernard Darmawan. Sanksi ini berkaitan penggunaan jet pribadi ketika masa kampanye Pemilu 2024.

Dede melanjutkan, semua fasilitas yang disediakan negara mesti digunakan untuk melancarkan tugas pejabat negara atau pejabat publik dan bukan untuk kepentingan pribadi. "Setiap anggaran negara harus digunakan dengan sangat hati-hati," tandas politikus Demokrat ini.

Dede menambahkan, anggaran KPU tahun 2026 telah mengalami pengurangan yang

cukup signifikan. Sebab periode tahapan Pemilu dan Pilkada belum berjalan. Sehingga tidak ada penggunaan untuk perjalanan yang berlebihan. "Karena memang tidak ada tahapan Pemilu," ujar dia.

Dede bilang, tahapan Pemilu 2029 baru dimulai pada 2027 sehingga anggaran bisa membesar lagi. Sehingga, Komisi II DPR akan mengawasi ketat penggunaan biaya perjalanan KPU nantinya.

Senada, anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menghormati putusan DKPP dalam kasus tersebut. Putusan itu akan menjadi bahan evaluasi dalam pembaffasan anggaran pemilu ke depan. "Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi KPU agar lebih transparan dan efisien dalam penggunaan anggaran," ucapnya, kemarin.

Irawan menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemilu perlu diperkuat agar tidak ada lagi penyimpanan penggunaan dana publik. KPU harus lebih terbuka dan berhati-hati. "Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan anggaran yang lebih ketat," ujar politikus Golkar ini.

Bagaimana tanggapan KPU? Ketua KPU Mochammad Afifuddin menghormati sanksi peringatan keras yang dijatuhkan oleh DKPP. "Menjadi pembelajaran untuk ke depannya," ujar Afif sapaan akrabnya dengan singkat, Kamis (23/10/2025).

Sebagai informasi, sanksi peringatan keras terhadap Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan empat anggota KPU yakni, Idham Kholid, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz dibacakan langsung oleh Ketua DKPP selaku Ketua Majelis Heddy Lugito, pada Selasa (21/10/2025). ■ TIF